

[illegible]



[illegible]



## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

### 2.4.1 Tantangan

- Dengan sudah besarnya pagu dana di nagari yang bersumber dari APBN yang dikeluarkan dengan Dana Desa (DD) ini mengharuskan Camat melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan nagari secara intensif.
- Pelayanan public yang semakin berkembang dengan menggunakan teknologi elektronik mengharuskan aparatur kecamatan untuk meningkatkan sumberdaya manusianya.

### 2.4.2 Peluang

- Adanya kesempatan bagi aparatur kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan
- Adanya sumber daya alam berupa objek wisata untuk dikembangkan, seperti Bayang Sani di nagari Koto Baru, Selayang Pandang di nagari Pasar Baru, Pantai Api-Api, Pantai Karang Pauh di nagari Gurun Panjang Selatan dan Bukit Bendera di nagari Telaok.
- Dengan dibukanya jalan Bayang ke Alahan Panjang maka Kecamatan Bayang merupakan segitiga emas perdagangan antara Kota Padang, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kerinci.



### BAB III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD

Camat sebagai perangkat daerah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi, yang mana camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan social.

#### 3.1.1 Isu-isu strategis di Kecamatan Bayang

##### a. Kondisi Internal

- Tersedianya sumber daya manusia
- Sarana dan prasarana yang tersedia
- Masih kurangnya anggaran yang tersedia

##### b. Kondisi Eksternal

- Banyaknya kegiatan di semua bidang di nagari yang seharusnya dimonitor akan tetapi, sejumlah staf yang belum dapat difungsikan secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana.

#### 3.1.2 Prediksi keadaan Kecamatan Bayang 5 (lima) tahun ke depan secara manajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

##### a. Faktor Internal

###### Kekuatan :

- Adanya struktur organisasi yang terpola
- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
- Adanya koordinasi di wilayah Kecamatan Bayang yang baik
- Kecamatan Bayang sebagai wilayah pertanian, perikanan dan perkebunan
- Di sektor kepariwisataan Kecamatan Bayang mempunyai potensi wisata, antara lain, Bayang Sani (di nagari Koto Baru) Selayang Pandang (di nagari Pasar Baru) pantai Api-Api dan Bukit Bendera (di nagari Talaok)

###### Kelemahan :

- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana, prasarana dan dana
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari atas

##### b. Faktor Eksternal

###### Opportunities (peluang)

- Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat/pelatihan



2016-2021, yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”. maka didapat pemahaman visi sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir selatan, yaitu:

**Mandiri** : Berdiri sendiri yaitu dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah daerah secara optimal

**Unggul** : Masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul

**Agamais** : Suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agama dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat

**Sejahtera** : Perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari akademik dan social dalam balutan pemahaman agama dan adat.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sector unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Melihat kepada rumusan misi tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesisir selatan untuk tahun 2016-2021 adalah memajukan kehidupan masyarakat dari semua sector, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan agama. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalan sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.



### 3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Relstra

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Renstra OPD disusun sesuai tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD dalam waktu 5 tahun. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahun, yang disusun oleh setiap OPD.

Berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum merangkum seluruh kegiatan pemerintahan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pesisir selatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pariwisata dan imigrasi bencana secara berkelanjutan. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan kabupaten berbatasan.
2. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata.
3. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara selatan.
5. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah.
6. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengolahan yang ramah lingkungan.
7. Peningkatan sector ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.
8. Peningkatan potensi sumberdaya manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam.
9. Pengembangan kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan.



10. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

### 3.4 Telaakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada kantor Camat bayang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

- a. Petugas belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Perencanaan.
- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.
3. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dari bermacam isu strategis di semua urusan penyelenggara pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2016-2021) adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan public.
- b. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/nagari dalam tatanan Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah.
- c. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah.



**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang memiliki peran penting dalam penyusunan Rencana strategis. Berikut ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang dapat digunakan dalam melaksanakan misi kecamatan Bayang tahun 2016-2021, sebagai berikut:

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya fungsi pemerintahan, pembangunan, kelembagaan kesejahteraan social dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Meningkatnya fungsi pemerintahan	Persentase tersedianya segala kebutuhan kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase partisipasi masyarakat dan stekholder Dalam pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya disiplin dan kualitas SDM aparatur pemerintah kecamatan	Meningkatnya kesejahteraan social masyarakat	Persentase masyarakat miskin yang tersentuh jaringan pengaman sosial.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase aparatur kecamatan yang disiplin, berkualitas dan profesional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari.	Terwujudnya pengelolaan keuangan nagari yang transparan dan akuntabel	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari	17 nagari	17 nagari	17 nagari	17 nagari	17 nagari	17 nagari



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dengan serangkaian arahan kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkenan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan seperti table berikut ini:

#### Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera</b>			
<b>MISI 1 : MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
Meningkatnya fungsi pemerintahan, pembangunan, kelembagaan kesejahteraan social dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Meningkatnya fungsi pemerintahan	Melengkapi kebutuhan administrasi kantor.	Pengadaan sarana administrasi kantor.
	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan	Penyediaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan sarana dan prasarana kantor.
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Pembinaan dan koordinasi	Pembinaan, koordinasi, pengawasan, fasilitasi dan penyelenggaraan.
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Jaringan pengaman sosial	Monitoring distribusi raskin
<b>MISI 2 : Meningkatkan fungsi pembinaan aparatur dan fasilitasi pemerintahan Nagari.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
Meningkatnya disiplin dan kualitas SDM aparatur pemerintah kecamatan	Terwujudnya aparatur pemerintahan kecamatan yang berkualitas dan profesional	Peningkatan kualitas aparatur pemerintah kecamatan	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari.	Terwujudnya pengelolaan keuangan nagari yang transparan dan akuntabel	Pengawasan dan pembinaan	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari



## 100

Tulian	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come dan Kegiatan Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Prioride Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan fungsi pemerintahan, pemberdayaan, kelembagaan	Meningkatkan fungsi pemerintahan, pemberdayaan, kelembagaan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan kantor.		Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase tercapainya pelayanan administrasi perkantoran		100%	208.273.420	100%	213.033.390	100%		100%	226.112.850	100%	227.172.850	100%	228.172.850	100%	1.328.074.210			
Jasa pelayanan				1 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik.	Terpenuhiya kebutuhan telepon, internet, air dan listrik.		12 bulan	7.800.000	12 bulan	6.050.000	12 bulan	6.050.000	12 bulan	6.050.000	12 bulan	6.050.000	12 bulan	6.050.000	100%	38.050.000			
				2 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian.	Terpenuhiya honorarium jasa administrasi kepegawaian		12 bulan	53.684.300	12 bulan	51.402.850	12 bulan	51.402.850	12 bulan	51.402.850	12 bulan	51.402.850	12 bulan	51.402.850	100%	310.688.550			
				3 Penyediaan jasa terpelangan kebersihan dan keamanan kantor	Terpenuhiya kebersihan dan keamanan kantor		12 bulan	7.999.500	12 bulan	8.995.700	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.000.000	100%	52.995.200			
				4 Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor		12 bulan	19.461.320	12 bulan	19.461.400	12 bulan	19.500.000	12 bulan	19.500.000	12 bulan	19.500.000	12 bulan	19.500.000	100%	116.922.720			
				5 Penyediaan barang dan kebutuhan pengadaan	Terpenuhiya kebutuhan barang dan kebutuhan pengadaan		12 bulan	9.787.800	12 bulan	12.762.440	12 bulan	12.303.000	12 bulan	12.303.000	12 bulan	12.303.000	12 bulan	12.303.000	100%	73.730.240			
				6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhiya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	3.153.000	12 bulan	4.100.000	12 bulan	4.300.000	12 bulan	4.300.000	12 bulan	4.300.000	12 bulan	4.300.000	100%	24.504.000			
				7 Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas	Terpenuhiya bahan bakar kendaraan dinas		12 bulan	6.840.000	12 bulan	6.120.000	12 bulan	6.120.000	12 bulan	6.120.000	12 bulan	6.120.000	12 bulan	6.120.000	100%	37.440.000			
				8 Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhiya makanan dan minuman		12 bulan	32.642.500	12 bulan	37.180.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	100%	229.822.500			
				9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bulan	39.140.000	12 bulan	39.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	100%	238.140.000			
				10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		12 bulan	27.785.000	12 bulan	27.910.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	100%	175.895.000			
				11 Penunjang operasional pelayanan OPD	Terpenuhiya jumlah laporan operasional pelayanan OPD		12 bulan				12 bulan	6.076.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	100%	30.076.000			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur.		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhiya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	24.067.000	100%	45.253.650	100%	68.115.000	100%	68.115.000	100%	68.115.000	100%	68.115.000	100%	350.835.850			
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhiya pengadaan perlengkapan gedung kantor		12 bulan	8.000.000	12 bulan	27.493.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	100%	175.490.000			
				1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhiya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan				12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.500.000	12 bulan	4.500.000	12 bulan	4.500.000	100%	19.500.000			
				2 Pengadaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhiya pengadaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan				12 bulan	10.115.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	11.000.000	100%	13.000.000			
				3																			



[illegible]



[illegible]



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BJDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bayang disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 seperti berikut:



No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Persentase tersedianya kebutuhan kantor.	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Persentase partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Persentase masyarakat muslim yang terhubung jaringan pengaman sosial	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Persentase aparatur kecamatan yang disiplin, berkualitas dan profesional	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
6	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari	0	17 Nagari	17 Nagari	17 Nagari	17 Nagari	17 Nagari	17 Nagari	17 Nagari	




## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021 organisasi perangkat daerah (OPD) Kantor Camat Bayang digunakan sebagai pedoman melaksanakan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja (RENJA OPD) dan rencana kerja tahunan (RKT).

Perencanaan strategis (RENSTRA) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok yang dipercayakan kepada setiap dinas instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media .

Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsure pelaksana dan partisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

Pasar Baru, Februari 2018  
**CAMAT BAYANG**  
  
**ILHAM RAHMATDSYAH PUTRA, S.STP.**  
NIP: 19830523 200212 1 002